

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

**HAFIDZ NUGROHO
NIM. 17108010063**

DOSEN PEMBIMBING:

**ACHMAD NURDANY, S.E.I., S.E., M.E.K
NIP. 19900525 000000 1 301**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-158/Un.02/DEB/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFIDZ NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 17108010063
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K
SIGNED

Valid ID: 602b218093160



Pengaji I

Lailatis Syarifah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 601cca5348cf6



Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6029e9b5de327



Yogyakarta, 28 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdaawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 602e25218a993

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hafidz Nugroho

Kepada

Yth. Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafidz Nugroho

NIM : 17108010063

Judul Skripsi : **“Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Pembimbing,



Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K

NIP. 19900525 000000 1 301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Nugroho

NIM : 17108010063

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bawa Skripsi yang Berjudul "**Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Penyusun



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Nugroho
NIM : 17108010063
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penyusun dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal, 26 Januari 2021
Yang menyatakan,



Hafidz Nugroho
NIM. 17108010063

HALAMAN MOTTO

Tentukan Pilihannya, Nikmati Jalannya, Syukuri Hasilnya

Maka Dari Itu,

Berproseslah, Bersemestalah, dan Berbahagialah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini spesial kepada

Kedua orang tuaku Bapak Suratman dan Ibu Siti Nur Rohmiyati

Kedua Kakak-kakakku Deliar Yudhantara Aditya

dan Septian Baskoro Adhi

Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa berdoa dan mendukung

untuk kesuksesan keluarganya

Tak lupa juga almamaterku UIN Sunan Kalijaga dan seluruh

bangsa Indonesia, semoga bermanfaat

Jerima kasih dan sehat selalu sodaraku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet
ر	Ra'	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُشَدَّدَةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَدَةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggalataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh katasandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudahterserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الاولىء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a Vokal Tunggal

Lambang vokal tunggal dalam bahasa arab adalah tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
◦ ---	<i>Fathah</i>	a	فَعْل	<i>Fa'ala</i>
◦ ---	<i>Kasrah</i>	i	ذَكْر	<i>Zukira</i>
◦ ---	<i>Dammah</i>	u	يَذْهَب	<i>Yazhabu</i>

b Vokal Rangkap

Pelambangan vokal rangkap dalam bahasa Arab merupakan gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
ي ◦ ---	<i>Fathah dan Ya</i>	ai	كَيْف	<i>Kaifa</i>
و ◦ ---	<i>Kasrah</i>	i	هَوْل	<i>Haula</i>

E. Maddah (Vokal Panjang)

Pelambangan maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab merupakan harakat dan huruf yang transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Ditulis	Contoh	Dibaca
<i>Fathah + Alif</i>	ā	سَال	<i>Sāla</i>
<i>Fathah + Alif maksūr</i>	ā	يَسْعَى	<i>Yas 'ā</i>

Kasrah + Yā' mati	ī	مَجِيدٌ	Majid
Dammah + Wau mati	ū	يَقُولُ	Yaqulu

F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah maka ditulis al-

الرجل الشمس	ditulis ditulis	<i>Al-rajulu</i> <i>Al-syam</i>
----------------	--------------------	------------------------------------

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof, sedangkan apabila letaknya di awal kalimat maka ditulis alif, seperti:

شَيْءٍ تَأْخُذُ أُمْرَتُ	ditulis ditulis ditulis	<i>Syai 'un</i> <i>Ta 'khužu</i> <i>Umirtu</i>
--------------------------------	-------------------------------	--

H. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

النَّمَاءُ أُعِدَّتُ لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>A 'antum</i> <i>U'idat</i> <i>La 'in syakartum</i>
--	-------------------------------	---

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Segala puji syukur penyusun sampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**” tepat pada waktunya. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada nabi agung kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlepas dari segala hambatan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun harus tetap bekerja keras dan menjaga semangat dalam penggeraan skripsi agar bisa terselesaikan dengan maksimal. Doa, dukungan, serta motivasi sangat diperlukan untuk mendukung itu semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Ibu Dr. Sunaryati, SE, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi.
8. Keluarga saya Bapak Suratman dan Ibu Siti Nur Rohmiyati beserta kakak-kakak saya Deliar Yudhantara Aditya dan Septian Baskoro Adhi terima kasih atas segala doa dan dukungannya yang tak terhenti. Serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Ekonomi Syariah 2017 khususnya Ekonomi Syariah B terima kasih telah menjadi wadah awal penyusun untuk berjuang selama kuliah, semoga selalu kompak dan tetap semangat.
10. Keluarga besar Forum Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (ForSEBI) khususnya angkatan Ibnu Taimiyah terima kasih telah menjadi wadah pengalaman dalam berorganisasi dan berproses.
11. Tak lupa keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FEBI dan Kharisma (Keluarga Mahasiswa Magelang) terima kasih atas segala dedikasinya dan tempat penyusun pulang serta menimba ilmu organisasi.
12. Teman seperjuangan satu kontrakan Faiq, Huda, Ammar yang telah menemani penyusun saat keadaan suka maupun duka untuk mengenal arti pentingnya persahabatan yang selalu kompak dan asyik, semoga kita bisa kembali piknik.
13. Teman-teman “Wisuda Bareng Squad” Mustaqim, Irul, Huda, Sofwan, Aji, Deni, dan Nash terima kasih telah menjadi kawan seperjuangan yang telah memberikan kesan dan waktu yang berharga bagi penyusun selama ini. Tetap solid kawan, ayo wisuda bareng.
14. Seseorang yang telah menemani saya akhir-akhir ini sebagai tempat berbagi cerita, pengalaman, kebahagiaan, dan keluh kesah terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga saat bertemu kita bisa bersama membaca skripsi ini.
15. Teman-teman KKN 102 Gunungpring terima kasih atas pengalaman dan waktu bersama kalian yang tidak akan pernah penyusun lupakan. Terima kasih juga telah memberikan tempat bagi saya untuk mengabdi kepada masyarakat.

16. Serta seluruh teman dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah mendukung dan membantu selama menempuh perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu semua.

Semoga seluruh kebaikannya Allah SWT dapat memberikan keberkahan dan hidayah-Nya serta dapat dibalas segala jasa-jasa mereka yang telah banyak membantu dalam penggerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penyusun mengharapkan adanya masukan serta saran agar kedepannya skripsi ini dapat disempurnakan. Harapan bagi penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat selanjutnya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Penyusun



Hafidz Nugroho

17108010063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Otonomi Daerah.....	14
2. Desentralisasi	17
3. Keuangan Daerah.....	22
4. Kemandirian Fiskal	25
5. Pendapatan Asli Daerah	29
6. Produk Domestik Regional Bruto	34
7. Belanja Modal	38
8. Jumlah Penduduk	42

9.	Indeks Pembangunan Manusia.....	45
10.	Luas Lahan Pertanian.....	49
B.	Telaah Pustaka	51
C.	Pengembangan Hipotesis	59
D.	Kerangka Pemikiran.....	64
BAB III METODE PENELITIAN		67
A.	Jenis Penelitian.....	67
B.	Sumber dan Jenis Data.....	67
C.	Populasi dan Sampel	68
D.	Definisi Operasional Variabel.....	68
E.	Teknik Analisis Data.....	70
1.	Analisis Regresi Data Panel.....	73
2.	Uji Spesifikasi Model	74
3.	Uji Asumsi Klasik.....	77
4.	Uji Model	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		82
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	82
1.	Kondisi Wilayah	82
2.	Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	86
3.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	88
4.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah	90
5.	Perkembangan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah	92
6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah	94
7.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.....	95
8.	Perkembangan Luas Lahan Pertanian Provinsi Jawa Tengah.....	97
B.	Analisis Data Penelitian.....	98
1.	Analisis Statistik Deskriptif	98
2.	Analisis Regresi Data Panel.....	101
C.	Pembahasan.....	111
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	111
2.	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah	113

3.	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah	116
4.	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah	119
5.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	121
6.	Pengaruh Luas Lahan Pertanian Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	124
BAB V PENUTUP.....		127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....		130
LAMPIRAN.....		xxiii
CURRICULUM VITAE.....		xxxix



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2014-2017 (dalam persen).....	2
Tabel 1.2 Data Hasil Produksi Padi Tahun 2019	3
Tabel 1.3 Tingkat Ratio Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	6
Tabel 2.1 Skala Interval Kemandirian Daerah.....	28
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	56
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	71
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota.....	87
Tabel 4.2 Data Statistik Deskriptif.....	102
Tabel 4.3 Hasil Uji Spesifikasi Model	105
Tabel 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	107
Tabel 4.4 Output Model <i>Fixed Effect</i>	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	4
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.	7
Gambar 2.1 Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia	48
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	69
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Regresi Data Panel	75
Gambar 4.1 Peta Administratif Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	86
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	90
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	92
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	94
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	96
Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	97
Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	99
Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Luas Lahan Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	100
Gambar 4.8 Histogram Pengujian Uji Normalitas	107

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Penelitian
- Lampiran 2: Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 3: *Common Effect Model*
- Lampiran 4: *Fixed Effect Model*
- Lampiran 5: *Random Effect Model*
- Lampiran 6: Uji Normalitas
- Lampiran 7: Uji Multikolinearitas
- Lampiran 8: Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9: Uji Autokorelasi
- Lampiran 10: *Chow Test*
- Lampiran 11: *Hausman Test*
- Lampiran 12: *Lagrangian Multiplier Test*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah penduduk, indeks pembangunan, dan luas lahan pertanian terhadap kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengambilan data sampel secara sekunder melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data APBD tiap daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan model pendekatan terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik karena data berdistribusi normal dan tidak terjadi masalah multikolinearitas walaupun terjadi masalah heteroskedasitas. Hasil regresi didapatkan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Untuk variabel pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif, sedangkan variabel produk domestik regional bruto, belanja modal, dan luas lahan pertanian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal. Sementara itu, variabel luas lahan pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian fiskal.

Kata Kunci: *Kemandirian Fiskal, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Luas Lahan Pertanian.*



ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the impact of local income, gross regional domestic product, capital expenditure, population, index of growth and agricultural land on regional fiscal independence in the province of Central Java between 2013 and 2018. By collecting secondary sample data through the Directorate General of Fiscal Balance, APBD data for each region, the Central Statistics Agency, and the Center for Agricultural Data and Information Systems, the type of analysis used is quantitative. With the Fixed Effect Model (FEM) chosen approach model, the research method uses panel data regression analysis. This research shows good results since the data is usually distributed and, while there is a heteroscedasticity problem, there is no multicollinearity problem. The findings of the regression showed that all variables had a major impact on fiscal independence. Local income and total population variables have a positive impact, whereas gross regional domestic product, capital expenditure and agricultural land area variables have a negative impact on the degree of fiscal independence. In the meantime, the agricultural land area component does not have any effect on fiscal independence.

Keywords: *Fiscal Independence, Gross Regional Domestic Product, Capital Expenditure, Population, Human Development Index, Agricultural Land Area.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya.

Proses bertambahnya kapasitas produksi dalam perekonomian disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki perbedaan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan proses bertambahnya jumlah output perkapita yang tinggi dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013: 65).

Berbagai indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor sumber daya alam (pertanian), dan kemandirian fiskal sebagai indikator desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan daerah (Aminuddin, 2017). Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dengan tujuan agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setiap kepala daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah miliknya. Dengan berkaca dari pengelolaan keuangan pusat, daerah pun bisa untuk menerapkan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengelola daerahnya sendiri, selain dari sisi pemerintahnya dan sumber daya yang dimiliki tiap

daerah. Kemandirian daerah dikatakan baik apabila pendapatan asli daerah lebih tinggi dari pendapatan lainnya. Pendapatan ini bisa melalui pajak ataupun retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2012: 5) yang menyatakan kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berikut data realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2014-2017:

Tabel 1.1 Realisasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Indonesia
Tahun 2014-2017 (dalam persen)

Bentuk Penerimaan	2014	2015	2016	2017
1. Pendapatan Daerah	88,57	91,74	90,09	94,08
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,44	11,5	11,31	13,21
3. Dana Perimbangan	60,28	62,09	63,52	65,43
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	16,85	18,15	14,66	15,44
5. Pembiayaan Daerah	11,43	8,26	9,91	5,92

Sumber: BPS Stastistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2017

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi pendapatan daerah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerahnya semakin berusaha untuk meningkatkan kemampuannya mendapatkan pendapatan hasil daerah mereka sendiri-sendiri. Semakin baik daerah tersebut dalam mengelola kemampuan daerahnya maka tingkat kemandirian daerahnya semakin baik. Tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014. Tetapi, dari sumber pendapat asli daerah terjadi fluktuasi dimana

antara tahun 2015 dengan tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan. Hal ini mendorong setiap daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dan terbukti tahun 2017 terjadi peningkatan pendapat asli daerah yang signifikan.

Salah satu provinsi terbaik dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dalam ajang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan pencapaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik mengungguli provinsi lainnya, disusul Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan di urutan kedua dan ketiga. Jateng unggul dalam hal perencanaan, inovasi, penurunan kemiskinan, integrasi program, dan kelembagaan yang efektif dan reformatif. Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah kembali memperoleh penghargaan sebagai provinsi terbaik tingkat nasional dalam perencanaan pembangunan daerah mengungguli Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Jateng dinilai terbaik karena inovasi dan capaian kinerja daerahnya¹. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan produksi beras tertinggi di Indonesia tahun 2019.

Tabel 1.2 Data Hasil Produksi Padi Tahun 2019

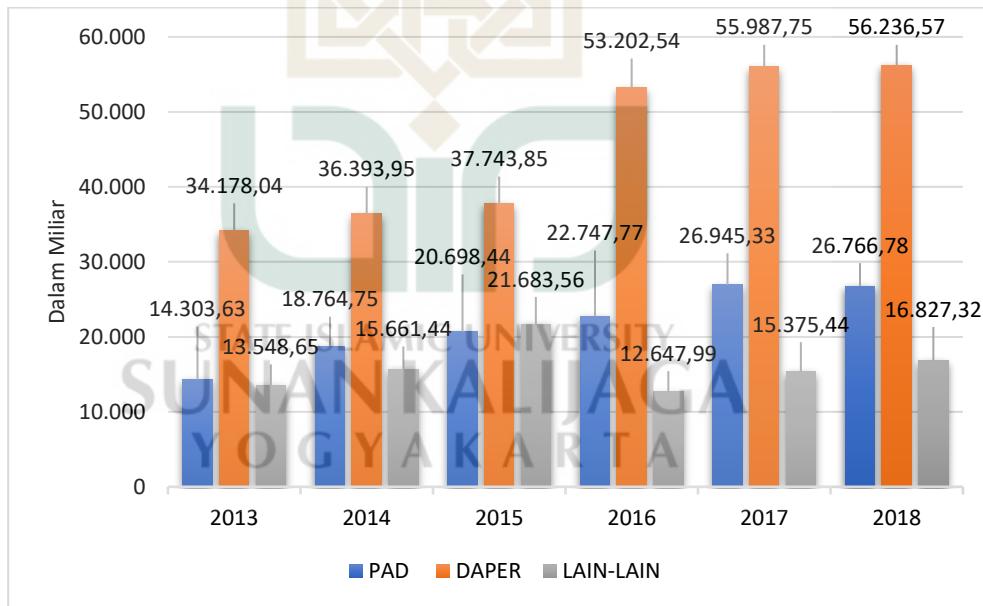
Provinsi	Luas Lahan Panen	Gabah Kering	Produksi Beras
Jawa Tengah	1.678.479 hektare	9.655.653 ton	5.539.448 ton
Jawa Timur	1.702.426 hektare	9.580.933,88 ton	5.496.581 ton
Jawa Barat	1.578.835 hektare	9.084.957 ton	5.212.039 ton

Sumber: Kementerian Pertanian

¹ www.jatengprov.go.id diakses tanggal 21 November 2020 pukul 20.47

Jawa Tengah memiliki luas lahan tanam sebesar 1.692.546 hektare, mampu menghasilkan 9.655.653 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 5.539.448 ton beras mengungguli Provinsi Jawa Timur yang lebih luas lahannya dan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut pun menjadikan Jawa Tengah bisa dikatakan berhasil dalam mengelola daerahnya sehingga mampu mendongkrak pembangunan daerah dengan mengoptimalkan anggaran dan pendapatan daerah. Potensi daerah pun dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut adalah perkembangan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018:

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2018



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp.14,3 triliun meningkat menjadi Rp.26,95 triliun pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD menjadi Rp26,77 triliun. Sementara itu, Dana Perimbangan tahun 2014 sebesar Rp.34,18 triliun terjadi peningkatan Rp.56,24 triliun pada tahun 2018. Sedangkan sumber

lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2013 sebesar Rp.13,55 triliun meningkat hingga tahun 2015 menjadi Rp.21,68 triliun. Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi Rp.12,65 triliun hingga akhirnya meningkat sampai tahun 2018 sebesar Rp.16,83 triliun. Bantuan pemerintah kepada Provinsi Jawa Tengah masih terbilang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Adanya peningkatan bantuan tersebut akan membantu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembelanjaan daerah dalam menunjang peningkatan fasilitas infrastruktur maupun pelayanan daerah sehingga akan lebih meningkatkan kemandirian keuangan. Sejalan dengan penelitian Muh. Almunawir, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan derajat kemandirian fiskal daerah memiliki pengaruh positif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat ketergantungan Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat bisa dikatakan tergolong tinggi. Kemandirian fiskal dapat diukur dengan skala yang didapatkan dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau yang disebut dengan dana perimbangan. Semakin tinggi nilai ratio kemandirian fiskal, maka daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang rendah. Hal tersebut menandakan bahwa daerah telah mampu mencukupi kebutuhan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai sektor yang ada tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Berikut adalah perbandingan ratio kemandirian fiskal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018:

**Tabel 1.3 Ukuran Ratio Kemandirian Fiskal Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

No.	Kab/Kota	KFD	No.	Kab/Kota	KFD
1	Cilacap	28,15	19	Kudus	26,32
2	Banyumas	34,22	20	Jepara	27,57
3	Purbalingga	22,79	21	Demak	28,40
4	Banjarnegara	17,43	22	Semarang	29,33
5	Kebumen	21,28	23	Temanggung	23,57
6	Purworejo	23	24	Kendal	25,84
7	Wonosobo	19,90	25	Batang	22,65
8	Magelang	23,25	26	Pekalongan	24,16
9	Boyolali	23,84	27	Pemalang	19,47
10	Klaten	23,96	28	Tegal	24,6
11	Sukoharjo	35,54	29	Brebes	19,79
12	Wonogiri	17,56	30	Kota Magelang	43,8
13	Karanganyar	25,88	31	Kota Surakarta	48,38
14	Sragen	23,94	32	Kota Salatiga	37,24
15	Grobogan	20,76	33	Kota Semarang	126,58
16	Blora	14,77	34	Kota Pekalongan	30,56
17	Rembang	32,88	35	Kota Tegal	25,21
18	Pati	23,46			

Sumber: data realisasi DJPK Kemenkeu 2018

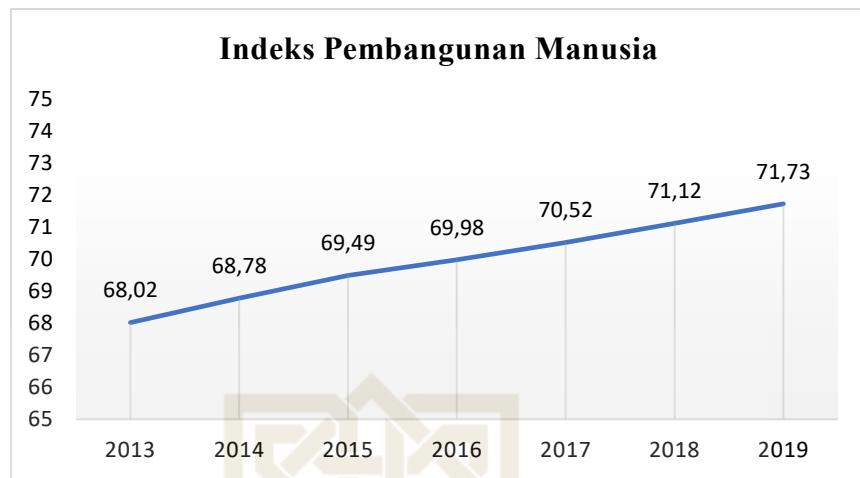
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa melalui perhitungan antara pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan didapatkan 19 daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah atau dibawah 25 %. Skala tersebut menunjukkan hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah masih memegang kendali dalam pelaksanaan otonomi khususnya keuangan daerah. Hal ini dapat membuktikan bahwa porsi daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah lebih banyak dari pada daerah yang memiliki ratio kemandirian fiskal tinggi. Oleh karena itu, daerah di Provinsi Jawa Tengah masih belum mampu menjalankan otonomi daerah secara penuh. Diharapkan

pemerintah mampu memanfaatkan sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan, pembangunan, dan pembiayaan daerah.

Salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan mengukur perhitungan seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan pada sektor ekonomi suatu daerah dalam satu periode waktu tertentu atau biasa disebut dengan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Penelitian Manasep Orocorna, dkk (2015) mengungkapkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010-2015. Setiap daerah tentunya akan menggali setiap kekayaan ekonominya untuk mendukung pembangunan daerahnya yang berpengaruh pada nilai PDRB yang tinggi.

Penelitian Aminuddin (2017) menyatakan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan melalui kemandirian fiskal. Pengelolaan keuangan daerah harus diimbangi dengan kualitas masyarakatnya agar dapat berjalan dengan baik. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kualitas fisik dan non fisik masyarakat, yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Gambar 1.2 Grafik Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah, angka Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan setiap tahun seperti pada gambar 1.2 dimana dari tahun 2013 mengalami peningkatan dengan angka tertinggi 71,73 pada tahun 2019. Capaian ekonomi masyarakat pada tahun tersebut bisa terpenuhi seiring dengan kemampuan daerah mengelola keuangannya. Jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap peningkatan permintaan efisiensi pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin banyaknya tuntutan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Penelitian Dewi (2017) menjelaskan bahwa pengalokasian belanja modal dalam bentuk anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetap termuat dalam kebijakan APBD. Pembangunan sarana dan prasarana daerah dianggarkan melalui belanja modal. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi juga dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Secara teori semakin tinggi nilai investasi

modal maka akan mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik dimana pada akhirnya dapat meningkatkan peran masyarakat terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2009: 93).

Seperti kita ketahui sebagian besar mata pencarian penduduk indonesia sebagai petani. Penelitian Hidayati (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara luas lahan pertanian terhadap pendapatan pertanian. Dimana jika pendapatan petani meningkat maka akan berpengaruh juga terhadap PDRB sektor pertanian di setiap daerah. Sejalan dengan penelitian Arotaa (2016) juga menyimpulkan terdapat hubungan antara luas lahan pertanian dengan PDRB sektor pertanian. Sebaliknya dalam penelitian Apriliandaru (2019) dengan menggunakan variabel hasil produksi, biaya produksi, tenaga kerja tani, dan luas lahan mengungkapkan variabel luas lahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan apabila lahan yang digunakan luas maka petani akan kesulitan dalam mengawasi lahannya dan berakibat menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Hidayat (2005: 76) berpendapat bahwa sebagian besar negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan kemandirian fiskal. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah, sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik, dan yang terpenting untuk memperluas otonomi daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerahnya dalam mengelola keuangan yang berasal dari daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandiriannya, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah meningkatkan

kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan manfaat dan relevasinya tentang kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah maka penyusun ingin meneliti terkait kemandirian fiskal daerah diukur dari pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan. Adapun variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan luas lahan pertanian dengan mengambil judul “**Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

5. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
6. Bagaimana pengaruh luas lahan pertanian terhadap kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian untuk mengetahui hal yang dapat dicapai setelah penelitian ini, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
3. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
5. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
6. Menganalisis pengaruh luas lahan pertanian terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemandirian fiskal tiap daerah di Provinsi Jawa Tengah dan di provinsi atau wilayah lainnya.
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi yang berkepentingan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang merupakan penjelasan deskriptif mengenai topik yang akan ditulis dimana terdiri atas lima bab, masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran awal penelitian yang menjadi titik tolak acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan tentang isi utama atau fenomena hal yang berkaitan dengan kemandirian fiskal. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya melalui penelitian ini berdasarkan pada uraian latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui pentingnya penelitian ini.

Bab II Landasan Teori memuat tinjauan pustaka mengenai teori yang relevan dengan topik penelitian dengan didukung hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna memperkuat gagasan penelitian. Bab ini juga mengungkapkan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menjawab rumusan masalah serta kerangka pemikiran untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang pemaparan terkait hal teknis apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian ini guna menjelaskan setiap variabel yang digunakan. Pemaparan yang dimaksud berupa rancangan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, deskripsi variabel penelitian, dan teknik atau metode analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, awalnya akan digambarkan secara singkat gambaran perkembangan tiap variabel. Dilanjutkan dengan analisis deskripsi dan hasil uji olah data yang kemudian dipaparkan penjelasan untuk setiap pengujian yang digunakan. Output dari pembahasan bab ini adalah terjawabnya seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di bab pendahuluan.

Bab V Penutup memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari tahapan penelitian dimana kesimpulan ini menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian ini guna menyempurnakan hasil penelitian ini dan dapat bermanfaat bagi kepentingan umum untuk depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *fixed effect* dan mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV dengan melibatkan beberapa variabel, yaitu tingkat kemandirian fiskal daerah, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan luas lahan pertanian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal, hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat. Besaran PAD yang didapatkan merupakan cerminan dari pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai indikator daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Besarnya PDRB yang dihasilkan akan mengurangi tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan PDRB menghitung jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dari seluruh kegiatan perekonomian sehingga tidak memberikan pendapatan daerah.
3. Belanja modal (BM) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Semakin tinggi anggaran belanja modal yang

digunakan maka akan mengurangi tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penurunan tingkat kemandirian fiskal ini terjadi karena belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga tidak memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah.

4. Jumlah Penduduk (JP) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal sehingga bertambahnya jumlah penduduk dapat menaikkan tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penambahan jumlah penduduk akan memberikan kemudahan dalam menjalankan faktor perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya akan memberikan tambahan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Sehingga adanya peningkatan indeks pembangunan akan menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.
6. Luas Lahan Pertanian (LLP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.
7. Secara keseluruhan variabel penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dari hasil tingkat probabilitas uji simultan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dirasa perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
 - a. Diharapkan mampu memberikan masukan terkait kekurang yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi rujukan bagi para praktisi.
 - b. Penulis mengharapkan kedepannya bisa belajar dari praktisi yang memang sudah ahli dalam bidang ekonomi.
2. Bagi Akademisi
 - a. Untuk kedepannya bisa menjadi gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh pelajar, mahasiswa atau tenaga akademik lainnya.
 - b. Semoga penelitian ini dapat diperbaharui dan dikembangkan lagi oleh para akademisi yang akan menyusun penelitian terkait ini.
3. Bagi Pengambil Kebijakan
 - a. Pemerintah agar memperhatikan segala sektor terutama PAD agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap keuangan daerah.
 - b. Pemerintah mampu menerapkan kebijakan peningkatan pembangunan manusia dan pengelolaan keuangan pada sektor basis masyarakat.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Diharapkan mampu mendalami kinerja keuangan daerah dan menambah variabel penelitian lain dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya: Erlangga.
- Cohen, S. (2006). *Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal*. Thessaonica: Fifth Annual Conference.
- Gusfahmi. (2001). *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, S. (2005). *Too Much Too Soon; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imawan, R. (2002). *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: Makalah.
- Jan Hoesada. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, J. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- M.L. Jhingan. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- Sukirno, S. (2013). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara
 Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Skripsi

- Aminuddin, M. R. (2017). *Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anwar, D. K. (2019). *Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Apriliandu, A. H. (2019). *Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Budiwati, R. L. D. (2020). *Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Alokasi Umum sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Pulau Jawa Periode 2016-2017)*. Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Handayani, N. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung.
- Hidayati, I. W. N. (2017). *Analisis Pengaruh Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Sribit)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Indayani, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Irhamni. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartikasari, D. (2011). *Pengaruh luas lahan, modal, dan tenaga kerja terhadap hasil produksi padi di kecamatan keling Kabupaten Jepara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kartikasari, R. (2014). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah, Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah Dan Silpa Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2012)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mubasiroh, L. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Di*

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhamad, H. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Luas Lahan Pertanian di Jawa Tengah Periode 2015-2017.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Pambudi, S. B. (2008). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.* Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset.* Jakarta: Salemba Empat.
- Widiyarto. (2017). *Pengaruh Size, Belanja Modal, Leverage, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Jurnal

- Amalia, F. R., & Purbadharma, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3 No. 6, hal. 257–264.*
- Andriansyah, Y. (2017). Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam: Pengalaman Dinasti 'Uṣmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah Vol. 9 No. 1, hal. 1-14.*
- Anwar, E., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2015). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Efisiensi IEP-FEB Unsrat Manado. Vol. 15 No. 1, hal. 1–12.*
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi, 11(1), 68–79.*
- Arotaa, A. N., Katiandagho, T. M., & Olfie, B. (2016). Hubungan Antara Luas Lahan Pertanian Dengan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Kota Tomohon. *Jurnal ASE Vol. 12 No. 1, hal. 13-28.*
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah Akuntansi Universitas Negeri Padang.*
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18 No. 3, hal. 1745-1773.*
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Adaerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. (studi kasus provinsi sulawesi selatan). *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(32).*
- Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Layuk, P. K. A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No. 3, hal 1–17.*

- Puspareni, S. (2017). Pengaruh Income Perkapita dan Upah Minimum Regional terhadap Human Development Index Antar Kabupaten di Jawa Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9. hal. 42-43.
- Putri, T. K., Boedijono, & Rohman, H. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Rusdiana, A. (2017). Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Era Otonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana*. hal. 3-12.
- Setianingrum, A. (2013). Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics* Vol. 4 No. 1, hal. 1-12.
- Soleh, A., & Ardilla, A. (2018). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1, hal. 17-26.
- Sriyana, J. (1999). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 4 No. 1, hal. 102-113.
- Sumardi. (2014). Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Journal of Rural and Development* Vol. 5 No. 2, hal. 147-166.
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi* Vol. 12 No. 1, hal. 88-99.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 18 No. 3, hal. 79-92.
- Wardhanu, L. (2013). Analisis Implementasi Desentralisasi Serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal dan Alokasi Belanja Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*.

Internet

www.bps.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.jatengprov.go.id